

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai relasi petani keramba jaring apung (KJA) dengan tauke di Haranggaol Horisan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk relasi sosial dan ekonomi petani KJA dengan tauke terbagi ke dalam dua pola besar, yaitu petani ikan mandiri dan petani ikan yang terikat atau bermitra dengan tauke. Petani yang terikat/bermitra dengan tauke terbentuk karena keterbatasan modal petani sehingga bergantung pada tauke yang menyediakan pakan, bibit, dan modal tunai. Namun, konsekuensi dari pola ini adalah petani wajib menjual hasil panennya kepada tauke dengan harga yang ditentukan sepihak, sehingga posisi tawar petani sangat lemah. Sebaliknya, relasi mandiri dilakukan oleh petani yang memiliki modal sendiri sehingga menjual hasil panen ke pasar atau pabrik dengan harga lebih tinggi. Meskipun demikian, pola ini juga mengandung risiko besar karena petani harus menanggung sendiri ketidakpastian harga pasar.
2. Dampak relasi terhadap kesejahteraan petani menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata. Petani yang terikat dengan tauke cenderung mengalami kesejahteraan rendah karena sebagian besar hasil panen dipotong untuk membayar hutang, sehingga penghasilan bersih tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Kondisi ini membuat usaha yang dijalankan stagnan bahkan sulit berkembang. Sementara itu, petani mandiri

relatif lebih sejahtera karena memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan pembeli. Akan tetapi, kesejahteraan mereka tidak selalu stabil karena sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar. Adapun posisi tauke justru lebih diuntungkan, karena dengan menguasai akses modal dan distribusi hasil panen mereka memperoleh keuntungan yang lebih besar dan stabil.

3. Mekanisme pengelolaan usaha KJA yang adil dan berkelanjutan menuntut adanya kombinasi dari tiga hal penting. Pertama, penguatan kelembagaan petani melalui koperasi atau asosiasi agar mereka memiliki wadah kolektif dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Kedua, keterlibatan pemerintah dalam memberikan regulasi harga, subsidi pakan, serta kemudahan akses modal dan pasar sehingga ketergantungan petani terhadap tauke dikurangi. Ketiga, perbaikan pola kemitraan dengan tauke melalui transparansi dan kesepakatan tertulis, sehingga relasi yang terjalin lebih adil dan tidak menimbulkan dominasi sepihak.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi petani KJA, untuk memperkuat kelembagaan melalui pembentukan koperasi atau mengaktifkan kembali asosiasi yang telah ada. Dengan adanya wadah kolektif, posisi tawar petani akan meningkat dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali tauke. Selain itu, petani perlu meningkatkan kemampuan dalam manajemen usaha dan memahami dinamika harga pasar, sehingga mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga.

2. Bagi tauke, membangun pola kemitraan yang lebih transparan dan berkeadilan. Hal ini dilakukan melalui pembuatan kontrak tertulis yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga relasi yang terbentuk tidak bersifat sepihak dan menciptakan keuntungan bersama yang lebih berkelanjutan.
3. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, perlu adanya kebijakan yang berpihak pada petani, seperti regulasi harga, pemberian subsidi pakan, serta penyediaan akses modal dan pasar yang lebih mudah dijangkau. Pemerintah juga hendaknya berperan dalam mengaktifkan kembali asosiasi atau kelembagaan petani agar petani memiliki wadah untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan terhindar dari praktik monopoli.
4. Bagi peneliti selanjutnya, untuk memperluas kajian ke wilayah lain yang juga memiliki usaha KJA, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai relasi petani dan tauke. Selain itu, penelitian lebih lanjut mengkaji aspek lingkungan serta peran teknologi dalam pengelolaan KJA, sehingga diperoleh analisis yang lebih mendalam mengenai keberlanjutan usaha budidaya ikan air tawar di kawasan Danau Toba.